

MENINGKATKAN POTENSI PERTANIAN DENGAN IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN BAJAK GRATIS DI KECAMATAN LINTAU BUO, KABUPATEN TANAH DATAR

Nabila Oktafia¹ Rahmadhona Fitri Helmi²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

Email: nabilaoktafia2002@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the free plowing service program as an effort to increase agricultural potential in Lintau Buo District, Tanah Datar Regency. This program is a local government initiative that provides free rice field plowing services for farmers to reduce production costs and accelerate the planting process. The research method used is descriptive qualitative with data collection through interviews, observations, and documentation from various related parties, such as the Department of Agriculture, Agricultural Extension Centers, farmer groups, and farmers receiving the service. The results show that the free plowing service can significantly increase agricultural productivity with a 19.23% reduction in production costs and an increase in the cropping index. The success of the program is supported by the synergy between the government, agricultural machinery brigades, extension centers, and the active participation of farmer groups and the community. Obstacles such as limited agricultural machinery and complicated bureaucratic processes were challenges, but digital innovation in service submissions has facilitated farmer access. This study concludes that the free plowing service program is effective in increasing the agricultural potential of Lintau Buo District and recommends expanding the program to other agricultural aspects such as fertilization and harvesting for broader benefits. Ongoing coaching and supervision are important prerequisites for maintaining the sustainability and efficiency of this program.

Keywords: Policy Implementation, Free Plowing, Agriculture, Lintau Buo

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi pertanian yang luar biasa, menjadikannya salah satu produsen dan konsumen beras terbesar di dunia setelah Cina. Dalam kondisi ini, masyarakat Indonesia harus kreatif menemukan cara untuk meningkatkan atau setidaknya menjaga stabilitas produksi padi Indonesia. Ketahanan pangan Indonesia dapat dipertahankan dengan kestabilan produksi. Digunakan sebagai sumber utama makanan (IRRI, 1995; Yayock, 1997). Pertanian khususnya produksi beras, sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kementerian pertanian memperkirakan produksi beras total 8,46 juta ton pada bulan Maret dan 4,92 juta ton pada bulan April. Produksi beras nasional menurun tahun sebelumnya, menunjukkan kesulitan sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Meskipun angka ini menunjukkan bahwa sektor pertanian menghadapi banyak tantangan (Harianto, 2024).

Peningkatan produksi pertanian adalah tujuan utama dari pembangunan pertanian. Ini dapat dicapai melalui kebijakan pertanian yang mendorong produksi pangan melalui insentif, ekstensifikasi, dan diservikasi pertanian. Utama dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang bergantung pada sektor pertanian (Muhammad,

2024). Untuk meningkatkan produksi sektor pertanian, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program, dengan penekanan khusus pada pengelolaan lahan sawah. Salah satunya yaitu program cetak sawah baru, yaitu inisiatif pemerintah Indonesia untuk menambah luas lahan sawah produktif menguntungkan dalam meningkatkan produksi pangan nasional dan meningkatkan ketahanan pangan. Pada program ini bertujuan untuk mengolah lahan yang sebelumnya tidak produktif, seperti rawa dan lahan suboptimal, menjadi sawah dapat ditanami padi. (Komalasari, 2024).

Sumatera Barat memiliki potensi pertanian yang sangat besar, lokasi geografis yang bagus dan iklim yang mendukung. Karena tanahnya yang subur, berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik. Salah satu komoditas utama yang dibudidayakan adalah padi, dengan tanaman yang unggul lokal telah dikembangkan oleh petani setempat. Selain itu, adanya berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani mendorong potensi pertanian Sumatera Barat. Program-program ini meliputi pelatihan, penyuluhan dan akses ke teknologi pertanian. Potensi pertanian Sumatera Barat sangat besar terutama dalam produksi beras. Produksi beras provinsi ini mencapai sekitar 1.356.46 ribu ton pada tahun 2024 yang menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya (Satria et al., 2024).

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, khususnya pertanian padi sawah, namun beberapa masalah telah menghambat produktivitas pertanian sawah Tanah Datar dalam beberapa tahun terakhir. Bencana alam menyebabkan kerusakan lahan, yang merupakan salah satu masalah utama. Bencana banjir bandang pada bulan Mei 2024, sektor pertanian dan perkebunan masyarakat mengalami kerusakan dan gagal panen. Berdasarkan data dari dinas pertanian, kerusakan lahan pertanian akibat bencana mencapai 511,52 hektar. Untuk memulihkan sektor pertanian setelah dampak besar ini, diperlukan tindakan segera. Bupati Tanah Datar menyatakan bahwa sektor pertanian mengalami kerugian yang signifikan akibat banjir bandang. Perbaikan segera diperlukan untuk pemulihan pertanian, termasuk reklamasi lahan pertanian, perbaikan jalan usaha tani dan infrastruktur irigasi, bantuan benih, dan bantuan alsintan (Redaksi, 2024).

Petani di Tanah Datar menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi produktivitas pertanian mereka seperti tingginya biaya pengolahan dan keterbatasan akses terhadap alat pertanian modern. Biaya untuk membajak sawah dapat mencapai 30-35% dari total biaya produksi tanaman padi, yang menjadi beban berat bagi petani (Bagian Humas dan Protokol Tanah Datar, 2022). Program layanan bajak gratis ini muncul sebagai respon terhadap tingginya permintaan petani untuk mendapatkan bantuan dalam pengolahan lahan dalam setiap kunjungan lapangan, banyak petani mengungkapkan kesulitan mereka dalam membayar biaya jasa bajak dan mengakses mesin pertanian. Hal ini menyebabkan banyak lahan yang tidak terolah dan dibiarkan terlantar. Menyadari permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya mencari solusi baru untuk meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi tanggung jawab petani. Salah satu layanan terbaik adalah Bajak Gratis yang diluncurkan dengan tujuan untuk mengurangi biaya pengolahan petani (Maulina, 2025).

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 menetapkan salah satu program prioritas yang bertujuan untuk menekan biaya produksi di sektor pertanian, yaitu melalui pemberian layanan bajak sawah secara gratis. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diterbitkan regulasi pelaksanaannya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 56 Tahun

2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bajak Gratis, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki tanggung jawab dalam menjalankan program ini dengan menjalin kerja sama bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, serta melibatkan sejumlah kelompok dan unit terkait seperti Gapoktan, Poktan, UPJA, dan SPBU.

Namun, ada keterbatasan jumlah mesin bajak dan tenaga kerja yang diperlukan, serta keterlambatan dalam pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang diperlukan untuk program bajak gratis. Alsintan adalah alat dan mesin yang digunakan dalam budidaya tanaman mulai dari tahapan produksi hingga pasca panen. Berdasarkan hasil wawancara terkait dalam melaksanakan program bajak gratis ini ada kendala dalam melaksanakan program tersebut, dalam wawancara dengan Wel Embra S.P Kabid Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan di Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, menjelaskan bahwa:

“Dalam melaksanakan program bajak gratis ini menghadapi kendala terkait tingginya permintaan/permohonan petani terhadap bantuan program ini sementara anggaran yang tersedia belum cukup, dan ketidakcocokan data, antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Banyak petani yang tidak terdaftar dengan akurat dalam sistem ini, sehingga mereka tidak mendapatkan akses ke layanan bajak gratis”.

Tabel 1. Peningkatan Hasil Panen Terhadap Program Bajak Gratis data tahun 2021-2022

Indikator	Sebelum inovasi (2021)	Setelah inovasi (2022)
Produktivitas padi	5,73 ton/ha	5,75 ton/ha
Lapangan kerja tercipta	-	19 THL dan 1.659 operator alsintan
Biaya Produksi per Ha	Rp. 9.362.500	Rp. 7.562.500

Menunjukkan produktivitas padi pada tahun 2022 terjadi peningkatan produktivitas pertanian yang mencerminkan efisiensi pengolahan lahan. Meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung surplus padi. Pada lapangan kerja tercipta penyerapan tenaga kerja melalui pembentukan Brigade dan Sub Brigade Alsintan di 14 kecamatan. Mendukung perluasan lapangan kerja berbasis pertanian. Pada biaya produksi per Ha efisiensi biaya mencapai Rp. 1.800.000 atau penghematan sebesar 19,23%. Menekankan beban biaya usaha tani secara berbasis pertanian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam implementasi Program Layanan Bajak Gratis di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali realitas sosial secara komprehensif berdasarkan pengalaman para pelaksana program dan masyarakat yang terlibat. Jenis data

yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi terhadap informan kunci yang terdiri dari pejabat Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, ketua kelompok tani, dan petani penerima manfaat. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, laporan instansi, peraturan daerah, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan menjalin interaksi langsung bersama informan melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, serta pengamatan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Selain itu, dokumen-dokumen terkait kebijakan dan pelaksanaan program turut dikaji untuk memperkuat temuan. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan metode untuk memperoleh gambaran yang valid dan menyeluruh. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yakni reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data dalam bentuk naratif dan kutipan hasil wawancara, serta penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Ketiga tahapan ini dilakukan secara iteratif untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap proses implementasi program serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

PEMBAHASAN

Implementasi Program Layanan Bajak Gratis Sebagai Upaya Meningkatkan Potensi Pertanian di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar

Program Bajak Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar yang bertujuan untuk mengurangi biaya pengolahan lahan, mempercepat waktu tanam, serta meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Program ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bajak Gratis di Kabupaten Tanah Datar. Melalui program ini, petani dapat mendapatkan layanan pengolahan sawah secara gratis dari pemerintah daerah. Program bajak gratis ini salah satu contoh paling nyata dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung kesejahteraan petani dalam program bajak gratis.

Implementasi Program Layanan Bajak Gratis Sebagai Upaya Meningkatkan Potensi Pertanian di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar memiliki peran dalam meningkatkan potensi pertanian di wilayah ini. Petani memiliki akses yang lebih mudah dan lebih murah untuk pengolahan sawah terhadap program ini, yang telah mempercepat waktu penanaman dan meningkatkan jumlah lahan yang secara teratur dikelola setiap tahun. Peningkatan jumlah petani yang memanfaatkan bajak gratis ini dari tahun ketahun dan disertai dengan penghematan biaya produksi yang cukup besar.

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, implementasi program layanan bajak gratis sebagai upaya meningkatkan potensi pertanian di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, dapat dilihat melalui 5 bentuk temuan utama terkait pelaksanaan layanan bajak gratis yaitu:

1. Layanan Bajak Gratis dan Tata Cara Pelaksanaan Bajak Gratis

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengambil tindakan strategis untuk meningkatkan potensi sektor pertanian dengan menerapkan program layanan bajak gratis untuk mengurangi beban biaya pengolahan lahan bagi para petani. Brigade Alsintan, tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengoperasikan alat pertanian, menjalankan fasilitas pembajakan sawah yang disediakan

oleh layanan ini secara gratis. Petani mendapatkan bantuan tanpa biaya dalam pengolahan lahan melalui program ini, seperti penggunaan alat bajak modern dan tenaga operator yang berpengalaman dan terlatih.

Pelaksanaan layanan bajak gratis dimulai dengan petani dan kelompok tani mengajukan permohonan kepada Dinas Pertanian Kabupaten. Mereka dapat mengajukan permohonan secara langsung melalui formulir yang disediakan oleh Brigade Alsintan di tingkat kecamatan atau melalui aplikasi online e-Layanan Bajak Gratis. Setelah permohonan diterima, penyuluh pertanian bersama dengan manajer Brigade Alsintan akan memverifikasi dan memverifikasi bahwa permohonan tersebut benar.

Setelah verifikasi selesai, operator alat bajak akan dijadwalkan untuk melaksanakan pembajakan di lahan petani sesuai permohonan. Proses ini juga dilengkapi dengan pengukuran luas lahan yang dibajak menggunakan aplikasi terintegrasi untuk memastikan keakuratan pelayanan. Seluruh pelaksanaan dibimbing dan diawasi oleh tim brigade serta penyuluh sehingga pelayanan berjalan lancar dan efektif.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Ibu Sri Mulyani S.P.,M.Si, yang mengatakan :

“Layanan bajak gratis ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam biaya produksi petani sekaligus mempercepat proses tanam, sehingga mampu menaikkan indeks pertanaman serta hasil panen. Program ini memberikan dampak besar bagi petani karena mampu menekan biaya pengolahan lahan yang selama ini cukup membebani. Pemerintah pun terus menunjukkan komitmennya melalui penambahan alat dan peningkatan sistem manajemen pelaksanaan agar manfaat program ini dapat dinikmati secara maksimal oleh para petani”.

Pelaksanaan program layanan bajak gratis tidak semata-mata ditentukan oleh peran pemerintah dan Balai Penyuluhan, tetapi juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif serta partisipasi langsung kelompok tani sebagai pihak yang paling merasakan manfaatnya. Pengalaman dan perspektif dari kelompok tani mencerminkan sejauh mana program ini berhasil diimplementasikan, sekaligus menjadi indikator nyata atas dampak positif yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan wawancara dengan ketua kelompok Tani Nagari Pangian bapak Roni Hidayat mengatakan:

“kami sangat bersyukur dan terbantunya petani dengan adanya program ini. Sebelumnya, kami harus mengeluarkan biaya besar untuk bajak sawah, tapi dengan program ini semua terasa ringan. Kualitas pembajakan juga bagus, sehingga sawah kami siap tanam lebih cepat, agar program ini terus diperkuat lebih banyak anggota kelompok tani yang dapat terbantu di masa mendatang”.

Bagi masyarakat penerima, petani merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk meningkatkan luas tanam dan produktivitas hasil pertanian di nagari mereka karena layanan bajak gratis memungkinkan mereka untuk mengembangkan usahanya tanpa khawatir tentang biaya awal pengolahan lahan.

Keberhasilan program layanan bajak gratis sangat ditentukan oleh sejauh mana manfaat yang dirasakan langsung oleh para petani. Oleh sebab itu, evaluasi dan pengembangan program perlu didasarkan pada pemahaman yang mendalam dari kelompok tani sebagai penerima program bajak gratis ini. Melalui masukan yang konstruktif dari petani, pemerintah dan pihak terkait dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta menentukan aspek-aspek yang perlu diperbaiki agar layanan dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

Kelompok tani berperan sebagai penerima program bajak gratis melainkan juga sebagai mitra strategis dalam komunitas pertanian. Mereka turut berperan aktif dalam mengorganisir anggota kelompok, mengawasi pelaksanaan layanan bajak gratis, serta memberikan masukan yang berharga bagi perbaikan program ke depan. Demi tercapainya keberhasilan dan manfaat yang berkelanjutan, sinergi yang kuat antara pemerintah, balai penyuluhan, dan kelompok tani menjadi hal yang sangat krusial dan harus terus dijaga.

Layanan Bajak Gratis dan Tata Cara Pelaksanaan Bajak Gratis Brigade Alsintan tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah alat dan tenaga operator yang masih belum mampu menjangkau seluruh permintaan petani secara merata. Kondisi ini menyebabkan sebagian lahan harus menunggu giliran lebih lama untuk dibajak, sehingga berdampak pada keterlambatan proses tanam. Di samping itu, prosedur administrasi pengajuan layanan yang sebelumnya cukup kompleks juga menjadi hambatan, meskipun saat ini telah mulai diperbaiki melalui penerapan sistem aplikasi berbasis online.

2. Brigade Alsintan serta Peran dan Tugas Brigade Alsintan

Brigade Alsintan merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar sebagai penyedia jasa alat dan mesin pertanian (alsintan). Lembaga ini berperan sebagai pelaksanaan program layanan bajak gratis, dengan tugas utama menyediakan dan mengoperasikan alsintan untuk membantu petani dalam proses pengolahan lahan. Struktur organisasi Brigade Alsintan di Kabupaten Tanah Datar mencakup tenaga administrasi tingkat kabupaten hingga tingkat nagari. Pembentukan tersebut diatur secara resmi oleh dinas terkait dan diambil keputusan oleh Kepala Dinas Pertanian. Di dalam struktur ini, setiap anggota brigade memiliki peran yang jelas, mulai dari koordinator lapangan, mekanik, operator alat, hingga staf administrasi.

Peran utama Brigade Alsintan adalah mengembangkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian serta teknologi mekanis pertanian yang dapat mempercepat berbagai kegiatan pertanian, mulai dari pratanam, tanam hingga panen. Brigade Alsintan juga menjadi fasilitator bagi para petani dalam mengakses layanan alsintan tersebut. Tugas Brigade Alsintan mencakup memfasilitasi dan mengoptimalkan pemanfaatan alat-alat pertanian bantuan pemerintah pusat maupun daerah. Mereka membantu percepatan pengolahan tanah dengan memberikan layanan bajak gratis secara profesional dan terjadwal, sehingga proses produksi pertanian menjadi lebih efisien.

Brigade ini berperan sebagai pelaksana jasa pembajakan yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah, sehingga proses pengolahan sawah berlangsung lebih cepat dan efisien. Kehadiran Brigade Alsintan turut menjamin bahwa setiap petani memperoleh layanan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal tanam yang telah direncanakan.

Implementasi layanan bajak gratis telah memberikan dampak yang signifikan bagi para petani, terutama dalam menekan biaya produksi dan mempercepat proses pengolahan lahan. Program ini dinilai sebagai salah satu langkah strategis dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan di lapangan serta antusiasme petani terhadap program tersebut, muncul aspirasi agar layanan ini dapat terus ditingkatkan dan menjangkau wilayah yang lebih luas.

Para petani memahami bahwa ketersediaan alat dan mesin pertanian yang mencukupi merupakan elemen penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan program bajak gratis,

mereka berharap agar jumlah alsintan yang dikelola oleh Dinas Pertanian dapat terus ditambah guna memenuhi permintaan yang kian meningkat, terutama menjelang musim tanam. Dengan adanya peningkatan fasilitas tersebut, para petani meyakini bahwa layanan ini akan memberikan manfaat yang lebih besar dan menjadi salah satu fondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Brigade Alsintan masih menghadapi sejumlah tantangan terkait koordinasi dan kualitas sumber daya manusia. Sebagian operator masih membutuhkan pelatihan lanjutan agar dapat menjalankan alat bajak dengan lebih profesional dan efisien. Selain itu, koordinasi internal antar anggota brigade maupun dengan petani di beberapa wilayah belum berjalan secara optimal, sehingga memengaruhi efektivitas layanan yang diberikan.

3. Sistem Informasi

Sistem informasi pada program layanan bajak gratis di Kabupaten Tanah Datar dikembangkan dalam bentuk aplikasi online yang bertujuan mempermudah petani dalam mengajukan permohonan untuk layanan pembajakan sawah tanpa biaya. Melalui platform ini, petani dapat mengakses informasi terkait persyaratan, prosedur layanan, serta kontak petugas yang bertanggung jawab di masing-masing kecamatan, sehingga pelaksanaan layanan menjadi lebih terbuka, efisien, dan mudah dijangkau.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Ibu Sri Mulyani S.P.,M.Si, yang mengatakan :

“ sistem informasi ini menjadi salah satu pondasi penting dalam pelaksanaan layanan bajak gratis. Kami menyediakan aplikasi yang dapat diakses oleh petani secara langsung agar mereka tidak kesulitan mendapatkan layanan. Sistem ini juga memudahkan kami dalam mendata dan memverifikasi permohonan dengan cepat”.

Salah satu keberhasilan program layanan bajak gratis tidak lepas dari kemajuan dalam pengelolaan data yang mendukung pelaksanaan di lapangan. Dengan sistem pencatatan yang lebih rapi dan terstruktur, proses monitoring dan evaluasi menjadi lebih mudah dilakukan, sehingga pemerintah dapat memastikan program berjalan sesuai target dan tepat sasaran. Dengan informasi yang jelas tentang luas lahan yang telah dibajak dan daerah-daerah yang masih perlu perhatian khusus, tindakan perbaikan dan pengembangan program bisa dilakukan secara cepat dan tepat guna demi memaksimalkan manfaat bagi para petani.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wel Embra S.P Kabid Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan di Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar mengatakan:

“pengelolaan data juga menjadi lebih terstruktur sehingga dapat dilakukan evaluasi pelaksanaan program secara berkala, kita bisa lihat berapa hektar sawah telah dibajak, daerah mana yang kurang terlayani, sehingga langkah perbaikan bisa lebih cepat”.

Perkembangan teknologi digital telah berhasil mengatasi berbagai kendala administratif yang sebelumnya menjadi tantangan bagi para petani. Dengan adanya kemudahan akses ini, diharapkan tingkat partisipasi petani dalam program layanan bajak gratis semakin meningkat, sehingga program tersebut dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Tanah Datar.

Sistem informasi hambatan yang dihadapi adalah belum terintegrasinya data petani

penerima layanan secara menyeluruh antara berbagai platform, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data dan penerima bantuan, yang pada akhirnya dapat mengganggu ketepatan penyaluran layanan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, khususnya di wilayah pedesaan, juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program.

4. Kerjasama dan Pembiayaan

Pelaksanaan program layanan bajak gratis di Kabupaten Tanah Datar didukung oleh sinergi yang kuat antara berbagai elemen, mulai dari pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok tani, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat. Kolaborasi ini menjadi faktor krusial dalam menjamin bahwa layanan dapat berlangsung secara optimal, tepat sasaran, dan berkesinambungan. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan alsintan dan pendanaan, sementara kelompok tani serta masyarakat berperan aktif dalam implementasi program di lapangan.

Pendanaan untuk program ini sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disertai dukungan dari sumber pembiayaan lain yang sah secara hukum. Terdapat tiga skema pembiayaan yang digunakan dalam pelaksanaannya. Pertama, seluruh kebutuhan mulai dari penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), biaya operasional, bahan bakar, hingga honor operator ditanggung oleh pemerintah. Kedua, alsintan milik kelompok tani digunakan, sementara pemerintah menanggung biaya operasionalnya. Ketiga, alsintan milik pemerintah dipinjamkan kepada kelompok tani, dan biaya operasional ditanggung oleh kelompok tani itu sendiri.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Ibu Sri Mulyani S.P.,M.Si, yang mengatakan :

“Keberhasilan program layanan bajak gratis merupakan hasil dari kerja sama yang erat antara seluruh pihak yang terlibat. “Kami menjalin sinergi antara dinas, penyuluh, tim brigade alsintan, dan kelompok tani agar layanan dapat diberikan secara tepat waktu dan dengan kualitas yang baik. Dukungan pembiayaan dari pemerintah pun kami kelola seoptimal mungkin, sehingga setiap petani tanpa memandang luas lahan yang dimiliki dapat merasakan manfaat dari program ini”.

Kolaborasi antara pemerintah, Balai Penyuluhan Pertanian, dan kelompok tani menjadi faktor penentu keberhasilan program layanan bajak gratis. Sinergi yang terbangun pelaksanaan program berlangsung secara sistematis dan tepat sasaran, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh para petani. Melalui koordinasi yang efektif, kegiatan pengelolaan lahan pertanian menjadi lebih efisien, terorganisir, dan sesuai jadwal.

Kerja sama antar lembaga dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program masih menemui sejumlah kendala, khususnya dalam hal koordinasi lintas sektor dan komunikasi yang belum optimal. Beberapa pemangku kepentingan menilai bahwa mekanisme koordinasi masih perlu diperkuat agar pembagian peran dapat berjalan lebih sinkron serta mencegah terjadinya tumpang tindih tugas maupun penggunaan sumber daya. Pembiayaan program, meskipun berasal dari anggaran pemerintah daerah, terkadang mengalami keterbatasan terutama saat

menghadapi kebutuhan mendesak seperti perbaikan alat atau pengadaan bahan bakar. Hal ini memengaruhi kelancaran layanan bajak gratis di beberapa lokasi

5. Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam program layanan bajak gratis di Kabupaten Tanah Datar dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Kegiatan pembinaan ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh petugas, termasuk operator alsintan, memahami prosedur serta standar operasional yang telah ditetapkan. Sementara itu, pengawasan dilaksanakan secara rutin guna memantau kelancaran layanan di lapangan agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam proses pengawasan ini, Dinas Pertanian bersama Balai Penyuluhan Pertanian, Brigade Alsintan, dan aparat kecamatan secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program telah direalisasikan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan, serta memastikan bahwa penggunaan alat maupun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Ibu Sri Mulyani S.P.,M.Si, yang mengatakan :

“pengawasan yang ketat sangat penting dilakukan karena program ini menyangkut langsung kepentingan dan kesejahteraan petani. kami membentuk tim pemantau khusus yang secara berkala melakukan pengecekan terhadap operasional alat serta kinerja para operator di lapangan. Selain itu, hasil pelaksanaan program secara rutin dievaluasi melalui rapat koordinasi bersama seluruh pihak terkait, agar setiap persoalan yang muncul dapat segera ditangani”.

Keberhasilan program layanan bajak gratis sangat ditentukan oleh kontribusi aktif dari berbagai pihak, khususnya di tingkat pelaksana lapangan. Salah satu faktor utama keberhasilan terletak pada sejauh mana petani dan kelompok tani memahami prosedur pengajuan serta tahapan pelaksanaan program secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan pembinaan yang berkesinambungan agar seluruh proses dapat berlangsung dengan lancar tanpa hambatan berarti.

Pembinaan dan Pengawasan tantangan yang dihadapi yaitu keterbatasan tenaga pengawas dan frekuensi pembinaan yang belum merata ke seluruh wilayah. Pengawasan yang kurang intensif berpotensi menyebabkan penurunan kualitas layanan dan kurangnya akuntabilitas. Pembinaan terhadap operator alsintan dan petani juga perlu ditingkatkan agar implementasi program berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Variabel pendukung dan variabel penghambat dalam implementasi program layanan bajak gratis sebagai upaya meningkatkan potensi pertanian

Dalam implementasi Program layanan Bajak gratis sebagai upaya meningkatkan potensi pertanian di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhinya, baik itu variabel pendukung dan variabel penghambat. Berikut adalah variabel pendukung dan variabel penghambat dalam implementasi program bajak gratis yaitu:

Variabel pendukung

1. Dukungan pemerintah Daerah

Dalam upaya strategis untuk meningkatkan potensi pertanian Kabupaten Tanah Datar, pemerintah memberikan dukungan penuh melalui program layanan bajak gratis. Untuk memberikan bantuan, anggaran dialokasikan dalam menutupi semua biaya pengolahan lahan, termasuk penyediaan alsintan (mesin pertanian) dan biaya operasionalnya, upah operator. Ada tiga pola layanan fleksibel untuk program ini: dukungan penuh dari pemerintah, pemberdayaan alsintan milik kelompok petani dengan biaya operasional yang disubsidi, dan peminjaman alsintan dari pemerintah dengan biaya operasional.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Ibu Sri Mulyani S.P.,M.Si, yang mengatakan :

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat mendukung program layanan baja gratis ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan hasil pertanian. Untuk petani yang menggunakan layanan ini, kami menyediakan anggaran khusus untuk menanggung semua biaya pengolahan lahan. Untuk membantu pelaksanaan layanan ini, kami juga menyediakan mesin pertanian dan membentuk Brigade Mesin Pertanian. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk agar petani tidak terbebani dari biaya yang berlebihan sehingga mereka dapat lebih fokus pada peningkatan hasil tanam”

Pendirian Brigade Alsintan untuk membantu dalam penyediaan layanan bajak gratis semakin memperkuat dukungan pemerintah. Kehadiran Brigade Alsintan juga meningkatkan koordinasi antar pihak terkait, yang memperlancar dan meningkatkan efisiensi proses layanan. Pengajuan layanan menjadi semakin mudah berkat sistem administrasi yang dapat diakses petani melalui aplikasi dan prosedur yang transparan. Program bajak gratis di Kecamatan Lintau Buo telah mendapatkan respons yang baik dan tingkat pemanfaatan yang tinggi sebagai hasil dari semua faktor ini, yang berdampak pada kesejahteraan petani dan pertumbuhan produktivitas pertanian.

2. Respon Positif Masyarakat

Banyak petani menyambut program ini karena memberikan kemudahan dalam pengolahan lahan pertanian tanpa harus menanggung biaya yang besar. Inisiatif ini sangat mengurangi beban biaya produksi, yang selama ini menjadi hambatan terbesar bagi petani, meningkatkan insentif mereka untuk berpartisipasi dan memanfaatkan layanan yang ditawarkan. Layanan bajak gratis adalah faktor lain yang berkontribusi pada peningkatan hasil pertanian di daerah tersebut. Para petani dapat meningkatkan waktu tanam dan kualitas panen dengan memanfaatkan tanah yang dapat diolah lebih cepat dan efektif. Respon positif ini tidak hanya terlihat dari penerimaan layanan tetapi juga terwujud dalam keterlibatan aktif para petani di semua fase program, dari pendaftaran hingga pelaksanaan, yang memperlancar operasi dan mempromosikan keberlanjutan program.

Sebagaimana diungkapkan oleh petani yang menerima program bajak gratis ibu Rahma Deni, yang mengatakan:

“kami sangat bersyukur dengan adanya program bajak gratis ini. Selama ini Biaya untuk membajak lahan cukup besar, dan sering menjadi hambatan terbesar bagi para petani. Tanpa harus khawatir tentang biaya pembajakan, kami dapat lebih berfokus pada penanaman dan pengelolaan lahan, berkat program layanan bajak gratis ini. Mengingat bahwa peralatan bajak sangat modern dan para pekerja profesional, program

ini secara signifikan mengurangi biaya produksi kami”.

Selain itu, antusiasme masyarakat terhadap program layanan bajak gratis adalah bukti kuat bahwa program ini memenuhi kebutuhan dan situasi petani di daerah tersebut. Petani percaya bahwa mendapatkan akses yang lebih adil terhadap alat dan teknologi pertanian kontemporer sekarang lebih mudah. Ini menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta mendorong pola kerja sama yang positif untuk meningkatkan potensi pertanian Kecamatan Lintau Buo.

3. Tersedianya berbagai pola layanan

Berbagai pola layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan petani mendukung program. Program ini menggunakan tiga pola layanan utama. Pola pertama adalah layanan penuh yang melibatkan Brigade Alsintan, yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk alat mesin pertanian (alsintan), bahan bakar, dan upah operator. Karena pemerintah menanggung semua biaya pengolahan lahan, pola ini sangat membantu petani.

Dalam pola kedua, pemerintah memberikan alsintan kepada kelompok tani untuk mengelolanya secara mandiri, meningkatkan partisipasi dan kemandirian petani dalam pelaksanaan layanan, dan pola ini memungkinkan kelompok tani untuk mengelola alsintan secara mandiri. Dalam pola ini, pemerintah daerah tetap bertanggung jawab atas pembiayaan seperti bahan bakar dan biaya operator.

Pola ketiga adalah peminjaman alsintan dari Brigade Alsintan, yang diberikan oleh pemerintah. Karena keragaman pola ini, layanan dapat diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan petani di lapangan. Karena dapat menjangkau berbagai kelompok petani dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, berbagai pola layanan ini menjadi komponen penting dalam pelaksanaan program bajak gratis.

Petani dapat memilih jenis bantuan yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing dengan pilihan pola layanan, sehingga program ini dapat berjalan lebih efisien dan produktif. Di Kecamatan Lintau Buo dan seluruh Kabupaten Tanah Datar, pola-pola ini juga meningkatkan kerja sama antara pemerintah, kelompok tani, dan masyarakat petani, yang mendorong peningkatan produktivitas pertanian.

Dalam 3 pola layanan tersebut terdapat perbedaan antara nagari pangian dengan nagari taluak. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat penerima program bajak gratis nagari Pangian dengan ibu Winda Novita mengatakan:

“kami memakai pola 1 yang alsintan dari petani, tapi upah bajak dari dinas pertanian jadi sebagian gratisnya”.

Sedangkan dengan masyarakat penerima program bajak gratis nagari Taluak dengan bapak Vegi Astarino mengatakan:

“kelompok tani batu loweh alsintannya disediakan oleh dinas pertanian dan upah bajak juga disediakan. Pemakaian mesin bajak sudah 4 tahun kondisi mesin masih bagus dan masih beroperasi kami sangat bersyukur mendapatkan program bajak gratis ini biasanya kami membajak sawah dengan biaya 500 ribu.

Perbedaan dalam pola layanan bajak gratis yang digunakan di Nagari Pangian dan Nagari Taluak menunjukkan bagaimana program tersebut telah dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan dan keadaan kebutuhan masyarakat setempat. Di Nagari Pangian, keterlibatan petani dalam menyediakan peralatan pertanian mereka sendiri, didukung oleh pengeluaran upah bajak dari Dinas Pertanian, berfungsi sebagai cara untuk memaksimalkan pemanfaatan peralatan yang ada sambil juga mengurangi beban finansial pada pemerintah. Meskipun masih ada biaya tertentu yang harus dibayar oleh petani, pola ini menunjukkan bahwa pemerintah dan petani secara aktif bekerja sama untuk mengelola sumber daya yang tersedia.

Sementara itu, layanan bajak gratis di Nagari Taluak yang sepenuhnya bergantung pada penyediaan alsintan dan tenaga bajak dari dinas pertanian. Memberikan kemudahan maksimal bagi petani selama proses pembajakan sawah. Mesin tersebut tetap dalam kondisi baik selama empat tahun menunjukkan efektivitas manajemen pemeliharaan kantor dan kelompok petani dalam mengelola. Hal ini berdampak langsung mengurangi biaya produksi, sehingga petani merasa terbantu.

Variabel Penghambat

1. Keterbatasan Anggaran & sarana prasarana

Tujuan program untuk meningkatkan potensi pertanian belum sepenuhnya tercapai karena anggaran pemerintah daerah tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan petani, terutama selama masa puncak musim tanam. Akibatnya, tidak semua petani dapat mengakses layanan bajak gratis secara optimal. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Muhammad Mulia Akbar, A.Md. P Balai Penyuluhan Pertanian kecamatan Lintau Buo yang mengatakan:

“Anggaran pemerintah daerah sebagian besar telah dialokasikan khusus untuk program layanan bajak gratis ini. Namun, jumlahnya masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan petani, terutama selama musim tanam puncak. Akibatnya, kami belum bisa memenuhi semua permintaan layanan secara optimal, yang berarti beberapa petani harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan bantuan pengolahan lahan”.

Selain keterbatasan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya alat pertanian (alsintan) seperti mesin bajak, merupakan kendala yang signifikan. Proses pengolahan lahan terhambat oleh jumlah mesin bajak yang terbatas dan kurangnya perawatan yang memadai. Hal ini menyebabkan antrean panjang dan keterlambatan layanan, yang pada akhirnya menyebabkan petani tidak puas dan mengurangi kinerja program secara keseluruhan.

2. Validasi dan Sinkronisasi Data

Program ini menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Salah satu faktor utama yang digunakan dalam program ini untuk mengidentifikasi petani yang akan menerima manfaat. Namun, banyak petani yang sebenarnya memenuhi syarat untuk layanan bajak gratis tidak terdata dengan baik atau bahkan terlewatkan selama proses pengumpulan data karena data DTKS seringkali kurang dan tidak selalu mencerminkan kondisi nyata petani di lapangan.

Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Muhammad Mulia Akbar, A.Md. P Balai Penyuluhan Pertanian yang mengatakan:

“Data petani yang digunakan dalam program ini berasal dari berbagai sumber, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sistem informasi pertanian seperti SIMLUHTAN. Namun, seringkali ada ketidaksesuaian data antara DTKS dan SIMLUHTAN, sehingga beberapa petani yang seharusnya menjadi penerima program bajak gratis tidak terdata secara lengkap”

Selain itu, proses memperbarui dan menyinkronkan data di berbagai sistem memerlukan kerja sama yang erat dengan sejumlah organisasi terkait, termasuk dinas pertanian dan kelompok tani. Masih ada masalah dengan kelengkapan dan akurasi data lapangan, meskipun pembaruan data dilakukan setiap bulan. Kurangnya alat dan sumber daya untuk melakukan validasi data secara menyeluruh di lokasi yang terpencil membuat faktor ini semakin buruk. Dinas pertanian berusaha untuk melakukan verifikasi data secara langsung di lokasi, tetapi jumlah alat dan staf yang terbatas membuat proses ini belum optimal."

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini bahwa Pelaksanaan program layanan bajak gratis di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan potensi pertanian di daerah tersebut. Melalui program ini, petani memperoleh layanan pembajakan lahan secara cuma-cuma yang dilaksanakan oleh Brigade Alsintan sebagai pengelola dan operator alat mesin pertanian (alsintan). Kehadiran program ini berhasil menekan biaya produksi yang harus ditanggung petani serta mempercepat proses pengolahan lahan, sehingga turut mendorong peningkatan hasil pertanian dan kesejahteraan petani secara keseluruhan.

Jumlah penerima layanan bajak gratis menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, mencerminkan meluasnya jangkauan program serta tingginya minat petani dalam memanfaatkan fasilitas tersebut. Di tahun 2024, Kecamatan Lintau Buo mencatat pertumbuhan signifikan dalam jumlah petani yang mendapatkan layanan, seiring dengan bertambahnya kelompok tani yang turut berpartisipasi dalam program ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Meskipun program layanan bajak gratis telah memberikan berbagai manfaat, pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya jumlah alat mesin pertanian dan tenaga operator, yang berdampak pada keterbatasan jangkauan dan efektivitas layanan. Kondisi ini menyebabkan sebagian petani harus menunggu dalam antrean cukup lama karena belum sebandingnya antara permintaan layanan dan ketersediaan alat di lapangan.

Di samping manfaat yang telah dirasakan, pelaksanaan program layanan bajak gratis masih memerlukan berbagai perbaikan, khususnya dalam aspek administrasi dan tata kelola. Salah satu kendala yang menonjol adalah belum sinkronnya data petani penerima antara DTKS dan Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), yang menghambat proses verifikasi dan validasi penerima secara akurat. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan penyaluran layanan tidak tepat sasaran atau bahkan tumpang tindih dalam pemberian bantuan.

DAFTAR PUSTKA

- Elfisha, M. (2024). Program bajak sawah gratis Tanah Datar sasar 4.400 hektare pada 2024. antaranews.com.
- Fauzi, N. F. (n.d.). POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERTANIAN PADA KELOMPOK TANI SUMBER KLOPO I. 2018.
- Hariato, M. (2024). Kementan sebut potensi panen raya Maret-April capai 8,46 juta ton. antaranews.com.
- Heriyanto, D. (2024). Potensi Pertanian. sudimoro.digitaldesa.id.
- Informatika, dinas komunikasi dan. (2024). 16.303 Petani di Tanah Datar Telah Menikmati Layanan Bajak Sawah Gratis. tanahdatar.go.id.
- Komalasari, tia dwitiani. (2024). Pemerintah Targetkan Cetak Sawah Baru Seluas 3 Juta Hektare hingga 2029 Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Pemerintah Targetkan Cetak Sawah Baru Seluas 3 Juta Hektare hingga 2029" ,
- Kurniasih, evi satispi. (2019). Buku Ajar Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya.
- Laila. (n.d.). Kenali Usaha Peningkatan Hasil Agraris Guna Meningkatkan Mutu Pertanian. gramedia.com.
- Maulina. (2025a). Program Bajak Sawah Gratis Ringankan Beban Petani. rri.co.id.
- Muhammad, F. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM BAJAK GRATIS BRIGADE ALSINTAN BAGI PETANI SEBAGAI PROGRAM UNGGULAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR. 7(2), 326–342.
- Mulyono. (2009). Model Implementasi kebijakan George Edward III. mulyono.staff.uns.ac.id.
- Nasution, A. F. D. (2023). Metode Penelitian Kualitatif.
- Palanta, A. (2020). Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Langgam.id.
- Raihan, M., & Sujianto, A. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Layanan Bajak Gratis di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Kecamatan Sungai Tarab). 3(2), 1505–1515.
- Redaksi. (2024). 511,52 Hektar Lahan Pertanian Terdampak Galodo, Bupati Eka Putra Ajukan Reklamasi Lahan ke Kementan RI. langganan.id.
- Satria, A., Badri, R. M., & Safitri, I. (2024). Prediksi Hasil Panen Tanaman Pangan Sumatera dengan Metode Machine Learning. 3(2), 389–398.
- Soetari, E. (2014). Kebijakan Publik.